

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1. Kajian Pustaka**

Beberapa penelitian terdahulu secara singkat akan disajikan dalam kajian pustaka guna menunjukkan berbagai perkembangan terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, di antaranya;

Mark Shucksmith (2010) judul “*Disintegrated Rural Development? Neo-endogenous Rural Development, Planning and Place-Shaping in Diffused Power Contexts*” dalam artikelnya Shucksmith menjelaskan dengan detail tentang perkembangan Integrated Rural Development (IRD), mulai dari sejarah, hingga perkembangan, dan penerapannya di Skotlandia. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Skotlandia masih kurang terarah, yang berarti pembangunan tersebut belum mampu mencapai tujuannya secara utuh. Ada dua solusi yang ditawarkan di sini untuk mencapai tujuan tersebut, pertama ialah perubahan terhadap tata kelola. yang berarti bahwa meskipun membutuhkan tindakan secara kolektif dan mobilisasi berbagai aktor, namun sangat dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki kapasitas, berkonsentrasi, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berbagai tindakan yang diambil. Karena seperti diketahui, pembangunan merupakan sesuatu yang bersifat multisektoral dan juga sangat kompleks. Kedua ialah dibutuhkannya kekuatan yang mampu memotori tindakan dari berbagai kalangan sehingga dapat

memicu usaha dan upaya bersama untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. selain itu juga, hal tersebut dapat merangsang timbulnya inovasi-inovasi baru dan penggunaan potensi yang ada secara maksimal.

Okibe Hyginus Banko (2016) judul “*Local Government and Rural Development in Nigeria: A Case Study of Nkanu East Local Government Area (2008-2015)*” penelitian yang dilaksanakan oleh Banko ini, terfokus pada bagaimana strategi dalam pembangunan RD (Rural Development) di Nigeria khususnya dalam hal ini melihat bagaimana peran penting Pemerintah Daerah di Nkanu Timur sebuah wilayah di Enugu, Nigeria.

Banko mengadopsi Teori Sistem untuk menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah bagian dari sebuah sistem, dan berfungsinya sebuah sistem adalah sebagai kesatuan atau adanya interdependent (ketergantungan) antara sistem itu sendiri, dan satu bagian akan selalu mempengaruhi bagian lainnya. Adapun pertanyaan penelitian dalam studi ini terfokus pada tiga masalah yakni; (i) apa strategi sistem yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam program rural development di Nigeria; (ii) bagaimana pengimplementasian program rural development di Nkanu Timur antara Januari 2008 dan Januari 2015; (iii) apakah cara kepemimpinan Pemerintah Daerah di Nkanu Timur merupakan penghambat utama atau pendorong dalam rural development. Berdasarkan ketiga pertanyaan di atas maka ditemukan hasil kajian seperti berikut; (i) menjadikan sistem pemerintahan lokal sebagai

strategi dalam program pembangunan perdesaan di Nigeria. (ii) pemerintah lokal tidak secara berkelanjutan dalam melaksanakan/mengimplemntasikan program. (iii) kepemimpinan yang buruk merupakan penghalang dalam pengimpelemntasian proyek dari pembangunan perdesaan. Banko juga menambahkan bahwa adanya korupsi yang tinggi pada setiap levelnya, mismanagement, serta kurangnya pengawasan terhadap pembangunan perdesaan di sana.

Saeful Bachrein (2010) judul "*Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan*" terdapat sekitar lima strategi pembangunan yang dituliskan dalam jurnal ini terkait dengan pendekatan Desa membangun yaitu: 1) penyesuaian strategi pembangunan perdesaan antara pembangunan nasional dan daerah. 2) pemanfaatan potensi Desa secara optimal dan rasional serta menjaga kesimbangan dan kelestarian alam. 3) pengembangan landasan kuat agar Masyarakat Desa tumbuh dan berkembang secara mandiri. 4) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5) mendorong peran aktif Masyarakat Desa dalam kegiatan atau proses pembangunan. sementara hasil analisis menunjukkan setidaknya tiga poin; *pertama*, Bappeda provinsi harus lebih aktif dalam mengkordinasikan instansi-instansi terkait. *kedua*, pengoptimalan musrembang dengan pelibatan setiap pemangku kepentingan. *ketiga*, perlunya penumbuh-kembangan

kelembagaan loka perdesaan, karena merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan pembangunan.

Rahman (2014) dalam judul “*Koordinasi Penataan Pembangunan Perdesaan Diwilayah Provinsi Riau*” menulis bahwa pembangunan nasional dan daerah tidak akan memberi dampak berarti jika belum mampu memberdayakan potensi di Desa, dikarenakan baik sumberdaya alam ataupun sumber daya manusia terbesar terletak pada kawasan pedesaan yang dapat menopang pembanguana. Rahman, juga menyinggung pada umumnya Desa memiliki permasalahan yang bersifat struktural serta adanya faktor internal seperti kualitas SDM yang rendah, dan faktor eksternal semisal koordinasi pembangunan yang lemah dll. Lebih jauh diterangkan, kegagalan program pembangunan daerah dan Desa dikarenakan program pembangunan daerah hanya duplikasi dari program provinsi/nasional atau pembangunan yang bergaya executive planning/vertikal ketimbang mengoordinasikan pembangunan secara horizontal. Penelitian yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada 5 (lima) kabupaten ini secara substansial menunjukkan adanya ketidak akurasi data yang ditunjukkan oleh tumpang tindihnya data dari daerah, provinsi, dan pusat sehingga kurang sinergisnya kebijakan pembangunan perdesaan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Temuan
Mark Shucksmith (2010)	Disintegrated Rural Development? Neo-endogenous Rural Development, Planning and Place-Shaping in Diffused Power Contexts	Ada dua solusi yang ditawarkan disini untuk mencapai tujuan pembangunan, pertama ialah perubahan terhadap tata kelola. yang berarti bahwa meskipun membutuhkan tindakan secara kolektif dan mobilisasi berbagai aktor, namun sangat dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki kapasitas, berkonsentrasi, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berbagai tindakan yang diambil. Karena seperti diketahui, pembangunan merupakan sesuatu yang bersifat multisektoral dan juga sangat kompleks. Kedua ialah dibutuhkannya kekuatan yang mampu memotori tindakan dari berbagai kalangan sehingga dapat memicu usaha dan upaya bersama untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. selain itu juga, hal tersebut dapat merangsang timbulnya inovasi-inovasi baru dan penggunaan potensi yang ada secara maksimal.
Banko, O. H. (2016). International Journal Of Innovative Research And Developmen	Local Government and Rural Development in Nigeria: A Case Study of Nkanu East Local Government Area (2008-2015)	Penelitian yang dilaksanakan oleh Banko ini, terfokus pada bagaimana strategi dalam pembangunan RD di Nigeria khususnya dalam hal ini melihat bagaimana peran penting Pemerintah Daerah di Nkanu Timur sebuah wilayah di Enugu, Nigeria. Banko mengadopsi Teori Sistem untuk menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah bagian dari sebuah sistem, dan berfungsinya sebuah sistem adalah sebagai kesatuan atau adanya interdependent (ketergantungan) antara sistem itu

		<p>sendiri, dan satu bagian akan selalu mempengaruhi bagian lainnya. adapun pertanyaan penelitian dalam studi ini terfokus pada tiga pertanyaan yakni; (i) apa strategi sistem yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam program RD di Nigeria; (ii) bagaimana pengimplementasian program RD di Nkanu Timur antara Januari 2008 dan Januari 2015; (iii) apakah cara kepemimpinan Pemerintah Daerah di Nkanu timur merupakan penghambat utama atau pendorong dalam RD. Dari ketiga pertanyaan maka ditemukan hasil kajian seperti berikut; (i) menjadikan sistem pemerintahan lokal sebagai strategi dalam program pembangunan perdesaan di Nigeria. (ii) pemerintah lokal tidak secara berkelanjutan dalam melaksanakan/mengimplementasikan program. (iii) kepemimpinan yang buruk merupakan penghalang dalam pengimplementasian proyek dari pembangunan perdesaan. Banko juga menambahkan bahwa adanya korupsi yang tinggi pada setiap levelnya, mismanagement, serta kurangnya pengawasan terhadap pembangunan perdesaan di sana.</p>
<p>Saeful Bachrein (2010) Bappeda Provinsi Jawa Barat, Analisis Kebijakan Pertanian Volume 8 No. 2.</p>	<p>Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan</p>	<p>Lima strategi pembangunan yang terkait dengan pendekatan Desa membangun yaitu: 1) penyesuaian strategi pembangunan perdesaan antara pembangunan nasional dan daerah. 2) pemanfaatan potensi Desa secara optimal dan rasional serta menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. 3) pengembangan landasan kuat agar Masyarakat Desa tumbuh dan berkembang secara mandiri. 4) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan</p>

		<p>teknologi. 5) mendorong peran aktif Masyarakat Desa dalam kegiatan atau proses pembangunan. adapun temuan dari hasil kajian adalah sbb; <i>pertama</i>, Bappeda Provinsi harus lebih aktif dalam mengkoordinasikan instansi-instansi terkait. <i>Kedua</i>, penoptimalan musrembang dengan pelibatan setiap pemangku kepentingan. <i>Ketiga</i>, perlunya penumbuh-kembangan kelembagaan loka perdesaan, karena merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan pembangunan.</p>
<p>Rahman, K. (2014). Universitas Islam Riau. Jurnal Kajian Pemerintahan, 3(2), 48-59.</p>	<p>Koordinasi Penataan Pembangunan Perdesaan Diwilayah Provinsi Riau</p>	<p>Temuan dari penelitian ini adalah kegagalan program pembangunan Daerah dan Desa dikarenakan program pembangunan daerah hanya duplikasi dari program Provinsi/Nasional atau pembangunan yang bergaya executive planning/vertikal ketimbang mengkoordinasikan pembangunan secara horizontal. Penelitian yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada 5 (lima) kabupaten ini secara substansial menunjukkan adanya ketidak akurasi data yang ditunjukan oleh tumpang tindihnya data dari daerah, provinsi, dan pusat sehingga kurang sinergisnya kebijakan pembangunan perdesaan.</p>

Kesimpulan dari keempat kajian atau studi di atas menunjukkan bagaimana pembangunan kawasan perdesaan masih belum mampu mencapai hasil maksimal karena beberapa sebab di antaranya ialah; sebagaimana Shucksmith dalam kajiannya menunjukkan bahwa dibutuhkannya tatakelola

kelembagaan yang lebih baik di Skotlandia untuk memaksimalkan pembangunan kawasan perdesaan., Sedangkan O. H. Banko menjelaskan bahwa kepemimpinan yang buruk adalah penyebab kegagalan pembangunan di Nkanu Timur, Nigeria., Saeful Bachrein mencatat bahwa instansi yang memiliki fungsi koordinasi seperti Bappeda bekerja lebih ekstra dalam mengoordinasikan instansi-instansi pemerintah serta mendorong lembaga-lembaga masyarakat juga ikut andil dalam pembangunan kawasan perdesaan di Jawa Barat. Terakhir, K. Rahman menemukan kurangnya inovasi program oleh Pemerintah Daerah dan hanya merupakan duplikasi dari program di atasnya, Rahman juga menyerukan perlunya pengoptimalan terhadap sumber daya yang ada.

Kesamaan penelitian ini dengan keempat kajian/studi di atas ialah terletak pada fokusnya terhadap kelembagaan, akan tetapi penelitian ini mencoba membahas pembangunan kawasan perdesaan dalam kacamata kelembagaan/institusional secara lebih komprehensif, dalam artian tidak hanya terbatas pada instansi-instansi pemerintah saja. penelitian ini akan melihat hubungan-hubungan antar lembaga/institusi (stakeholder) baik antara Pemerintah, LSM, dan Universitas, serta berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan khususnya kawasan perdesaan.

## II.2. Kerangka Teoritik

### II.2.1. Teori Sistem Dan Fungsionalisme Struktural

#### a) Teori Sistem

Pendekatan Sistem adalah sebuah pendekatan yang lahir sebagai penyempurna dari kekurangan dua aliran analisis sebelumnya dalam menjelaskan masalah-masalah sosial, Pendekatan ini berupaya melihat segala sesuatu baik tingkat mikro dan makro sebagai sebuah kesatuan (sistem). Dua aliran analisis yang melatar belakangi lahirnya analisis sistem ialah Individualisme dan Holisme, individualisme misalnya dianggap gagal dalam menjelaskan masalah-masalah sistemis seperti kemiskinan, diskriminasi, dan keterbelakangan. Sementara Holisme dianggap gagal karena tidak melihat peran signifikan individu dalam perubahan sosial<sup>1</sup>. Sementara itu, pendekatan Sistem dianggap sangat berguna dalam menganalisis hubungan antar institusi, pelaku atau stakeholder, dan lingkungan.

Kajian sistem secara umum bisa diaplikasikan dalam berbagai jenis keilmuan baik *hard science* maupun *shof science*. Pada konteks *shof science* atau ilmu-ilmu sosial Talcott Parsons membagi sistem sosial menjadi beberapa sub-sistem seperti; *sistem ekonomi*, *sistem politik* (pemerintahan), dan *sistem fiduciary* (keluarga dan sekolah)<sup>2</sup>. Meskipun merupakan sub-sistem dari sitem

---

<sup>1</sup> Choi.H.(2013). *Sistemisme*. Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21, Jilid 1. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.ha.l 46

<sup>2</sup> G. Ritzer dan D. J. Goodman.(2008). *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Ke-6. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.121

sosial, akan tetapi sistem ekonomi, politik, dan fiduciary juga memiliki dimensi analisis yang begitu luas dan berbeda-beda, oleh karenanya tidaklah mudah untuk mengkaji sistem-sistem tersebut secara bersamaan. Parsons sebenarnya telah mengembangkan skema analisis terhadap sistem sosial yang mencakup ketiga sub-sistem tersebut, namun kajian kontemporer menunjukkan subsistem-subsistem tersebut telah berubah dan berkembang menjadi sistem-sistem yang begitu kompleks, sehingga dibutuhkan kajian-kajian secara khusus dan tersendiri.

Setidaknya terdapat dua cara yang paling sederhana dalam mengidentifikasi sistem, apakah sistem tersebut merupakan bagian dari sistem ekonomi, atau sistem politik, maupun sistem lainnya. pertama ialah dengan identifikasi unit-unit dari sistem tersebut, yang kedua identifikasi batas-batas antara sistem tersebut dengan lingkungannya<sup>3</sup>.

Berdasarkan kedua model identifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang merupakan kajian dalam penelitian ialah sistem politik, dikarenakan unit-unit yang menjadi objek analisis seperti BAPPEDA dan BPMPD (Lembaga Pemerintah), serta LSM, juga Universitas (lembaga non-pemerintah) ialah lembaga-lembaga memiliki kapasitas dalam mempengaruhi kebijakan atau paling tidak memiliki unsur tindakan yang dapat menentukan

---

<sup>3</sup> Magriasti L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton. Hal 254.

berbagai keputusan politik, terutama masalah pembangunan kawasan perdesaan.

Sistem Politik itu sendiri oleh Elly M. Setiadi dan Usman Kolip dipandang sebagai suatu rangkaian yang bekerja dalam mengelola input dan menghasilkan output, serta merupakan subsistem dari sistem sosial<sup>4</sup>. Meski pandangan tersebut cukup sederhana namun analisis sistem tidak sederhana itu, ada begitu banyak dimensi yang menjadi cakupan analisisnya, seperti misalnya Easton menekankan pada interaksi atau hubungan antar setiap bagian. G. A. Almond lebih pada dimensi struktur dan peran atau fungsi. Sedang Parsons pada pelakunya (actor)<sup>5</sup>.

Pendekatan sistem sebagaimana yang telah disebutkan di atas memang cukup luas, terutama sistem politik. Fisher bahkan membagi analisis terhadap sistem tersebut menjadi 5 (lima) ranah analisis yakni, Ranah awal tentang pengalokasian sumber daya yang terbatas. Ranah kedua tentang stabilitas, sosialisasi, dan input pendukung., Ranah ketiga ialah cara dan sarana untuk memicu loyalitas dan partisipasi publik. Ranah keempat adalah bagaimana cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir ialah pengawasan terhadap proses penyelesaian masalah dalam sistem<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip.(2013).Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta.Kencana Prenada Media Group.Hal. Hal. 31

<sup>5</sup> Ibid., hal.31

<sup>6</sup> J.R. Fisher.(2013).Teori Sistem Dan Fungsionalisme Struktural.IlmU Politik Abad Ke-21, Jilid 1. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.Hal 116

Sebagaimana diungkapkan Mitchell dalam Fisher menekankan tentang perlunya pengawasan terhadap *Proses Internal* sehingga diusulkan pemusatan perhatian pada beberapa aspek seperti Pencapaian Tujuan (Goal Attainment), Adaptasi, Pemeliharaan Sistem (System Maintenance), dan Manajemen Ketegangan, serta Integrasi<sup>7</sup>.

Asumsi yang kemukakan oleh William Mitchell tentang pentingnya pengawasan terhadap proses internal dalam sistem tersebut dianggap memiliki relevansi kuat dengan penelitian ini, dikarenakan pengawasan terhadap institusi-institusi sebagai bagian utama dari sistem politik, terutama terhadap proses didalamnya mutlak untuk dilakukan agar tercapainya tujuan bersama. Dengan begitu apa yang dikemukakan Mitchell tersebut merupakan parameter yang sangat signifikan dalam pemecahan problem yang menjadi fokus penelitian. Guna mendukung analisis sistem tersebut mencapai hasil yang lebih maksimal maka akan dikombinasikan dengan teori lain seperti Fungsionalisme Struktural yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari analisis sistem, namun lebih pada fungsi-fungsi yang dijalanka oleh setiap bagian dari sistem itu sendiri. sedangkan dalam pengelaborasi secara institusional yang dalam hal ini merupakan objek kajian penelitian, penggunaan teori New-Institusionalisme dianggap paling memadai, dan masing-masing teori tersebut akan dibahas selanjutnya.

---

<sup>7</sup> J.R. Fisher.(2013).Loc.Cit. Hal 116

## **b) Fungsionalisme Struktural**

Menurut G. Ritzer dan D. J. Goodman dalam fungsionalisme struktural tidak serta merta akan membuat kedua istilah tersebut selalu perlu untuk dihubungkan, dalam artian perhatian bisa saja difokuskan pada salah satu di antara keduanya, namun idealnya kedua istilah tersebut harus dipelajari secara bersamaan<sup>8</sup>. Pendekatan fungsional menurut Bernard Susser dan juga Cancian dalam J. R. Fisher merupakan pendekatan yang paling sering penggunaannya pada kajian ilmu politik terutama di Barat, serta memiliki motif yang sama yakni bertujuan untuk menghubungkan bagian satu dengan yang lainnya, sehingga pendekatan fungsi memenuhi pustaka profesional<sup>9</sup>. Talcott Parsons dalam pandangannya tentang struktur dan sistem juga menekankan pentingnya analisis terhadap fungsi sebagaimana dikutip dari G. Ritzer dan D. J. Goodman, dimana Parsons menjelaskan tentang empat fungsi penting bagi semua sistem “tindakan” yang lebih dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> G. Ritzer dan D. J. Goodman. Op. Cit. Hal 118

<sup>9</sup> J.R. Fisher. Op. Cit. Hal 114 . Mengemukakan tentang kedekatan teori sistem dan fungsionalisme struktural dimana terdapat kesamaan antara kedua teori tersebut, dan ketika peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural untuk mengkaji fungsi-fungsi dalam dunia politik seringkali dilakukan pada ruang lingkup sistem. Sama halnya, disini kajian juga akan dilakukan dengan pendalaman terhadap fungsi-fungsi pembangunan dalam lingkup sistem politik (pemerintah) yang ada di provinsi NTB.

<sup>10</sup> G. Ritzer dan D. J. Goodman. Loc. cit. Hal 121. Mengulas tentang pemikiran yang dikembangkan oleh Parsons tentang skema AGIL dalam kerangka teori fungsionalisme struktural yang diimplementasikan dalam berbagai sistem terutama sistem sosial.

Skema AGIL yang dikembangkan oleh Parsons dalam teori fungsionalisme struktural ini diyakini akan mampu menjadikan sebuah sistem tetap survive dalam situasi yang selalu dinamis. Skema ini menggambarkan empat fungsi penting dalam sistem. *Adaptation* (A) misalnya akan membantu sebuah sistem tetap survive jika sistem itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. *Goal Attainment* (G) sebuah sistem harus menetapkan tujuan dan tetap pada tujuannya. *Integration* (I) suatu sistem mutlak terhubung antar setiap bagian maupun secara fungsinya. *Latency* (L) pemeliharaan merupakan salah satu penopang penting menurut Parsons dalam sistem untuk tetap survive, pemeliharaan tersebut diartikan sebagai menjaga, melengkapi, dan juga melengkapi sistem itu sendiri<sup>11</sup>.

Dalam kerangka sistem sosial parson membagai fungsi (AGIL) kedalam beberapa subsistem. Adaptasi misalnya menurut Parsons dijalankan dengan sistem ekonomi, karena masyarakat akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan realitas eksternal melalui fungsi-fungsi ekonomi. Sistem politik/pemerintah menjalankan fungsi pencapaian tujuan masyarakat dengan mobilisasi sumber daya., sistem fiduciary (keluarga dan sekolah) berfungsi memelihara pola melalui norma dan nilai yang terinternalisasi. Sedangkan fungsi integrasi menurut parsons dilaksanakan komunitas masyarakat<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> G. Ritzer dan D. J. Goodman. Loc. Cit. Hal. 121

<sup>12</sup> Ibid hal 128

Teori Fungsionalisme Struktural versi Parsons ini memperjelas kembali bagaimana kedekatan antara teori sistem dengan fungsionalisme struktural, karena melihat dari apa yang diajukan oleh Mitchell tentang pengawasan terhadap sistem di atas sangat mirip walaupun tidak persis sama dengan skema AGIL yang dari Parsons tersebut. Susser juga beranggapan setidaknya ada tiga fokus yang menyamakan antara keduanya yakni sama-sama menganalisis input-output, analisis terhadap umpan balik (feedback), serta sama-sama melihat sistem politik sebagai pendorong terjadinya keseimbangan (ekuilibrium)<sup>13</sup>. Kedekatan antar Teori Sistem dan Fungsionalisme Struktural berdasarkan pandangan William Mitchell dan Talcott Parsons dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut;

Tabel 2.2. Teori Sistem Dan Fungsionalisme Struktural

William Mitchell; Aspek Pengawasan Sistem	Talcott Parsons; Skema AGIL Dalam Sistem Sosial
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptasi</li> <li>• Goal Attainment</li> <li>• Integrasi</li> <li>• System Maintenance</li> <li>• Manajement Ketegangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptation</li> <li>• Goal Attainment</li> <li>• Integration</li> <li>• Latency</li> </ul>

Source; Diolah dari J.R. Fisher.(2013).Teori Sistem Dan Fungsionalisme Struktural.IlmU Politik Abad Ke-21, Jilid 1. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.Hal 116

Kedua teori tersebut walaupun sering dikaji dalam lokus atau ruanglingkup yang sama namun masing-masing teori memiliki dimensi yang

---

<sup>13</sup> J. R. Fisher. Op. Cit. Hal. 120.

cukup luas. oleh karena itu pengaplikasian kedua teori tersebut nantinya dalam penelitian ini hanya masing-masing pada satu dimensi saja. Teori Sistem akan difokuskan pada dimensi pengawasan yakni *proses integrasi* dan Teori Fungsionalisme Struktural pada dimensi fungsi yang dalam hal ini adalah *fungsi pencapaian tujuan (goal attainment)*, pembatasan pada satu dimensi dimaksudkan untuk menghindari bias dan mendapatkan penginterpretasian yang jelas terhadap masalah yang dikaji (Pembangunan Kawasan Perdesaan).

### **II.2.2. Neoinstitusionalisme Dan Konsep Institusional**

Institusi sebagaimana didefinisikan March dan Olsen dalam Miller adalah sekumpulan aturan dan praktik terorganisasi yang bersifat relatif kuat dan tahan terhadap preferensi (kecendrungan) individu maupun lingkungan yang dinamis<sup>14</sup>. Seperti halnya konsep-konsep lain dalam ilmu sosial, konsep institusi juga tidak memiliki kesepakatan dan makna yang baku dari para ahli untuk dijadikan patokan dan tetap dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Oleh karenanya di sini institusi dipahami sebagai sekumpulan individu yang terstruktur dalam sebuah badan dengan tujuan-tujuan tertentu. Kajian terhadap institusi tetap dianggap penting karena kontribusinya terhadap berbagai peristiwa, perilaku dan perubahan politik<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> M.C. Miller.(2013).Neoinstitusionalisme.Ilmu Politik Abad Ke-21, Jilid 1. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.Hal 39.

<sup>15</sup> Kosandi.M.(2015).Kontestasi Politik Dan Perimbangan Kekuasaan Dalam Perumusan Dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1.

Neoinstitusionalisme atau lebih dikenal dengan istilah New-Institusional adalah pendekatan secara institusional yang juga memiliki beberapa dimensi analisis. Pada pendekatan secara tradisional (institusionalisme) kerangka yang digunakan lebih bersifat umum, seperti aspek normatif, struktur, aturan, budaya dan norma dalam sebuah institusi dikaji dalam satu kesatuan., Sedangkan New-Institusional seperti ditegaskan oleh Hall dan Taylor dalam Miller memiliki tiga varian aliran analisis yakni, Institusional Pilihan Rasional, Institusionalisme Sosiologi, dan Institusionalisme Historis<sup>16</sup>. Ketiga aliran New-Institusional tersebut juga memiliki model analisis yang berbeda-beda.

Institusionalisme Pilihan Rasional memiliki model Pendekatan Strategis, aliran ini melihat bagaimana para aktor dalam sebuah institusi selalu melakukan tindakan antisipatif terhadap reaksi dari institusi lain terhadap keputusan yang mereka tetapkan, dengan begitu pendekatan ini seringkali menekankan pada interaksi strategis antar institusi.

Aliran Institusionalisme Sosiologi berfokus pada aspek budaya (sistem simbol, skrip kognitif, dan templet moral) dari institusi, aliran ini beranggapan bahwa setiap institusi bahkan yang paling birokratispun tidak bisa terlepas dari konteks kebudayaan institusi itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Mark C. Miller.Op. Cit.Hal. 35-40

Aliran Institusionalisme Historis adalah pendekatan yang berdimensi cukup luas, karena diasumsikan bahwa institusi dibaluti oleh pertanyaan-pertanyaan besar (kompleks). Institusi dipandang bersifat dinamis dengan proses interaksi yang menarik dan tidak terduga. Serta perlunya perhatian yang serius terhadap waktu (sejarah) sehingga perubahan-perubahan penting dapat ditelusuri. Aliran ketiga ini juga beranggapan bahwa institusi perlu dikaji secara komparatif. Sanders dalam Miller berpendapat bahwa minat utama aliran ini terhadap institusi ialah *adaptasi, pemeliharaan, dan konstruksinya*<sup>17</sup>.

Tabel 2.3 Klasifikasi Pendekatan Neoinstitusional

Neoinstitusionalisme		
Institusionalisme Pilihan Rasional	Institusionalisme Sosiologi	Institusionalisme Historis
<p>Pendekatan Strategis</p> <p>Asumsi ; Tindakan antisipatif dari aktor dalam institusi terhadap aktor dan institusi lain, sehingga terjadinya interaksi strategis dalam penentuan keputusan.</p>	<p>Pendekatan Budaya</p> <p>Asumsi; Praktek-praktek dalam institusi tidak bisa terlepas dari konteks budaya seperti, sistem simbol, skrip kognitif, templet moral, bahkan mitos dan upacara.</p>	<p>Pendekatan Historis dan Komparatif</p> <p>Asumsi ; Institusi dipandang berdimensi luas dan selalu berubah, dengan begitu kajian secara historis dan komparatif dianggap penting.</p>

Source; Diolah dari Mark C. Miller.(2013).Neoinstitusionalisme.Ilmu Politik Abad Ke-21, Jilid 1. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.Hal. 41-43

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 41-43

Pemaparan terhadap ketiga aliran dalam pendekatan Neoinstitusionalisme ini dimaksudkan supaya lebih memperjelas pendekatan mana yang nantinya digunakan dalam penelitian ini, karena tidak mungkin bila ketiga pendekatan institusional ini digunakan secara bersamaan mengingat adanya keterbatasan waktu. Faktor penting lainnya yang perlu untuk dipertimbangkan ialah menjaga penelitian lebih terfokus pada tema sentralnya, untuk itu dalam pengaplikasian teori harus melalui pertimbangan matang atau dengan kata lain pendekatan tersebut harus memiliki relevansi kuat dan benar-benar bermanfaat dalam mendalami permasalahan. Sementara penggunaan pendekatan yang lebih dari satu dalam penelitian ini diyakini akan mendorong pemahaman secara komprehensif terhadap masalah penelitian. Jika dua teori sebelumnya difokuskan pada aspek *proses integrasi* dan *fungsi pencapaian tujuan*, sedangkan pada pendekatan Neoinstitusional ini akan lebih mendalami interaksi (interaksi strategis) antar institusi, artinya model analisis yang akan digunakan ialah pendekatan Institusionalisme Pilihan Rasional.

Interaksi Strategis di sini dianggap penting karena aktor-aktor dalam sebuah institusi pasti akan selalau bersikap rasional dalam artian tidak akan membiarkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau kelompoknya. oleh sebab itu langkah antisipasi terhadap tindakan dan reaksi dari aktor-aktor maupun kelompok lain akan selalu disertai dalam keputusan-

keputusan yang diambil, serta akan dibarengi dengan strategi-strategi khusus guna mereduksi timbulnya permasalahan yang dapat merugikan secara institusi maupun individu<sup>18</sup>.

### **II.2.3. Konsep Integrasi**

Integrasi pada prinsipnya dipandang perlu apa bila terdapat kemajmukan di antara berbagai komponen yang membentuk sebuah sistem atau struktur, integrasi itu sendiri dimaksudkan agar terjadinya keselarasan antar komponen-komponen yang ada, sehingga tujuan-tujuan dari sistem tersebut dapat tercapai. Integrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai “menjadi satu” dengan begitu integrasi bisa saja diterapkan dalam berbagai konteks baik itu tujuan, nilai, dsb. Bahkan dalam pengertian yang seperti itu integrasi bisa saja digunakan sebagai artikulasi untuk menjelaskan sebuah keadaan atau sifat bahkan sebagai seruan, seperti misalnya, terintegrasi, mengintegrasikan, dll. Artinya makna dari integrasi begitu luas tergantung konteks yang melekat padanya.

Ramlan Subakti dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip dalam konteks integrasi politik membagi integrasi menjadi lima jenis yakni., *Integrasi Bangsa, Wilayah, Nilai, dan Elit, serta Perilaku Integratif*<sup>19</sup>. Jenis integrasi yang terakhir sebagaimana dijelaskan Subakti mencerminkan

---

<sup>18</sup> Ibid., Hal. 41

<sup>19</sup> Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip.(2013).Op. Cit.Hal 76-77

keinginan dan kesediaan dalam berkerja sama untuk mencapai tujuan, baik kerjasama antar masyarakat dan pemerintah, maupun masyarakat dengan masyarakat<sup>20</sup>.

Ramlan Subakti lebih jauh menjelaskan setidaknya ada lima faktor yang memicu integrasi dalam masyarakat yakni, pertama primordial atau adanya ikatan kedekatan baik secara kekerabatan, tempat tinggal, suku, ras, dan adat istiadat. Kedua ikatan secara sakral seperti agama dan keyakinan. Ketiga ialah tokoh atau pemimpin karismatik. Kempat bineka tunggal ika atau kesamaan tujuan. Kelima ialah faktor ekonomi<sup>21</sup>.

Jenis dan faktor pemicu integrasi seperti di sebutkan Ramlan Subakti di atas cukup sejalan atau paralel dengan integrasi dalam konteks institusional baik secara internal maupun lintas-institusi. Secara internal misalnya, sikap atau prilaku integratif akan sangat berpengaruh terhadap performa institusi, bilamana tidak adanya sikap integratif individu dalam sebuah institusi maka akan menimbulkan berbagai permasalahan secara internal dan bisa dipastikan institusi tersebut akan sulit mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang mampu mendorong prilaku integratif dalam institusi ialah tergantung pada kepemimpinan dari institusi sendiri. Sedangkan integrasi lintas-institusi umumnya terbentuk apabila institusi-institusi memiliki kesamaan tujuan,

---

<sup>20</sup> Ibid. Hal. 77-81

<sup>21</sup> Ibid. Hal.88-91.

ideologi, maupun wilayah, dan faktor pemicu terjadinya integrasi dalam konteks ini juga bervariasi mulai dari faktor ekonomi hingga ikatan secara sakral.

Sedangkan Cooley dalam Retnowati<sup>22</sup> membagi integrasi menjadi tiga kategori. pertama, *integrasi normatif* merupakan tradisi baku masyarakat sebagai pengikat kehidupan bersama. kedua, *integrasi komunikatif*, komunikasi efektif yang dapat terjadi akibat adanya sifat ketergantungan antar pihak, yang kemudian bersepakat untuk berkerjasama menuju tujuan yang dikehendaki. ketiga, *integrasi fungsional*, integrasi yang terwujud atas dasar kesadaran akan perbedaan-perbedaan fungsi dan peran yang ada.

Integrasi institusional dalam kerangka penelitian ini pada prinsip telah terbentuk secara kewilayahan atau dalam hal ini wilayah politik, namun timbul pertanyaan tentang bagaimana agar institusi-institusi yang ada mampu terintegrasi secara program dan tujuan, mengingat sifat dari pembangunan perdesaan tersebut yang multifungsi serta multisektoral. Honadle dan VanSant dalam Soetomo menjelaskan bahwa sumber permasalahan utama perdesaan hanya dapat diselesaikan dengan adanya integrasi, yakni menangani permasalahan tersebut dengan seperangkat tindakan terkoordinasi dari berbagai

---

<sup>22</sup> Retnowati, R. (2014). Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik, Situbondo). *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 189-200.

aspek yang ada. Soetomo menjelaskan juga bahwa istilah integrasi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan koordinasi<sup>23</sup>.

#### **II.2.4. Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang tidak jauh berbeda dengan kawasan perkotaan dari segi fungsinya, hanya saja tidak sekompleks perkotaan. Pada dasarnya kawasan perdesaan digunakan sebagai tempat *permukiman*, dimana pada tahun 2003 terdapat lebih dari 3,3 miliar penduduk bumi tinggal diwilayah perdesaan<sup>24</sup>. Adapun fungsi lainnya ialah sebagai tempat, *pelayanan sosial*, *pelayanan pemerintahan*, dan *kegiatan ekonomi*, terutama sektor pertanian<sup>25</sup>. Lebih jauh, agar memahami tentang kawasan perdesaan, maka dirasa perlu untuk melihat tentang apa yang membedakan antara desa dan perdesaan.

Terdapat perbedaan cakupan dan makna antara Desa dan Perdesaan. Yangmana Desa merupakan sebuah wilayah administratif di bawah kecamatan. Dan perdesaan merupakan gambaran secara menyeluruh tentang keadaan sebuah kawasan (desa-desa) yang tertinggal secara sektoral daripada

---

<sup>23</sup> Soetomo.(2013).Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat.Yogyakarta.Pustaka Pelajar. Hal. 160

<sup>24</sup> Todaro, M. P. dan Smith S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembian. Jilid 1.jakarta. Erlangga

<sup>25</sup> Aziz Budianta.( 2010).Op. Cit. Didalam tulisannya dipaparkan berbagai permasalahan yang masih membelit kawasan perdesaan diantaranya; kawsan perdesaan masih terbelit oleh tingginya-kemiskinan, lapangan kerja yang sangat terbatas, rendahnya produktivitas dan pendidikan, serta rendahnya akses permodalan dan ekonomi.

wilayah perkotaan, atau adanya perbedaan konstruk antar keduanya<sup>26</sup>. Sedangkan dalam konteks pembangunan terdapat perbedaan secara mendasar mengenai cakupan antara desa dan kawasan perdesaan, baik itu lingkup wilayah, tujuan, dan prioritas. Lebih jelasnya seperti pada tabel 2.4 di bawah ini;

Tabel 2.4. Klasifikasi Pembangunan Desa Dan Desa Kawasan Perdesaan

<b>ASPEK</b>	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b>
Lingkup Wilayah	Desa/DesaAdat	Perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif
Cakupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana Desa;</li> <li>• Pengembangan potensi ekonomi lokal;</li> <li>• Pemanfaatan sumber daya alam dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;</li> <li>• pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;</li> <li>• Penguatan kapasitas masyarakat;</li> </ul>

<sup>26</sup> Susanto, R. (2014). "Konstruk, Indikator Dan Data Kemandirian Desa" dalam buku Indeks Kemandirian Desa. Jakarta. Buku Obor

	lingkungan secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan dan kemitraan ekonomi;</li> <li>• Pembangunan infrastruktur antar perdesaan.</li> </ul>
Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;</li> <li>• Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;</li> <li>• Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan</li> <li>• Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan dan Pemanfaatan Wilayah Desa Dalam Rangka Penetapan Kawasan Pembangunan Sesuai Dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota;</li> <li>• pelayanan yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;</li> <li>• Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi Perdesaan, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dan Kegiatan Ekonomi.</li> </ul>

Source; Diolah dari Bappenas.Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.pdf

Kim dan Yang dalam Budiharsono<sup>27</sup> mengajukan beberapa definisi tentang pembangunan kawasan perdesaan yang bersumber dari berbagai literatur dan pendapat yang beragam, di antaranya;

1. Moseley; mendefinisikan pembangunan kawasan perdesaan sebagai proses peningkatan kualitas hidup dari masyarakat yang hidu di daerah terpencil dan jarang penduduknya.
2. Lee et al. Peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan yang meliputi berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, budaya, kesejahteraan dan lingkungan.
3. Jeong; mendefinisikan pembangunan perdesaan sebagai rangkaian proses yang melibatkan partisipasi dan komitmen kelompok masyarakat lokal agar tercipta kondisis hidup yang lebih baik.

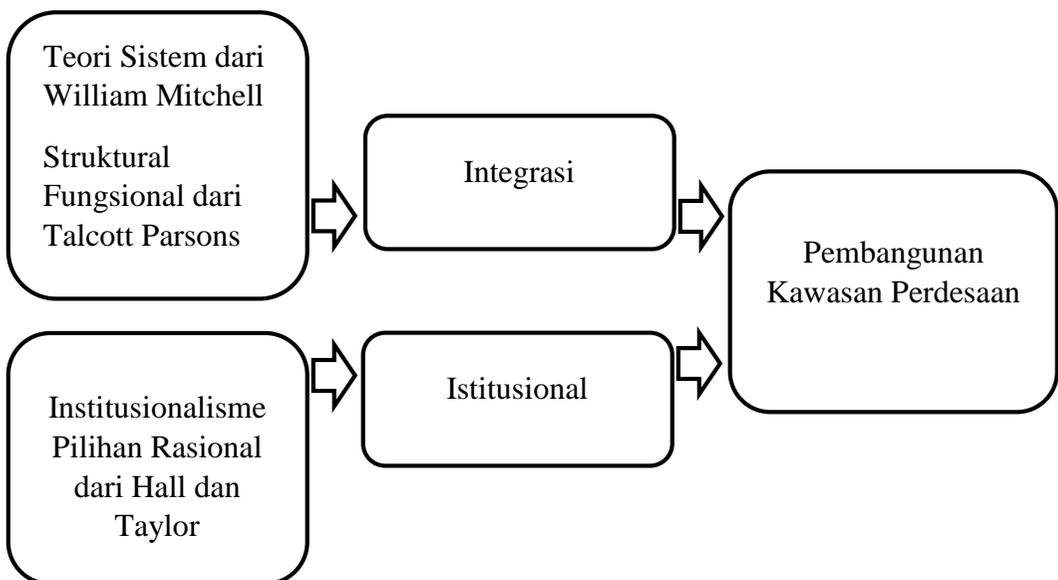
---

<sup>27</sup> Budiharsono S.2017.Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan.Jakarta.KDT. hal 34

### II.3. Kerangka Berpikir

Sub-bab berikut akan menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan teori dan konsep dalam bentuk kerangka dan terpola dengan harapan lebih memperjelas pengaplikasian teori dan konsep dalam penelitian.

Bagan 2.1. Kerangka Pikir Teoritik



## **II. 4. Definisi Konsepsional**

Berdasarkan ketiga teori di atas, maka dapat dijelaskan beberapa konsep yang melekat atau relevan dengan penelitian di antaranya adalah sbb;

- **Integrasi**

Integrasi dalam penelitian ini dapat dikonsepsikan sebagai penyatuan berbagai unsur atau kemajemukan struktur untuk mencapai keselarasan tujuan. Integrasi setidaknya dapat terbentuk jika setiap struktur dapat membangun komunikasi yang efektif (integrasi komunikatif), dan adanya kesadaran dan komitmen terhadap perbedaan fungsi dan peran (integrasi fungsional).

- **Institusional**

Institusional dikonsepsikan sebagai praket terorganisir yang dijalankan oleh sekumpulan aktor dengan aturan dan tujuan cukup jelas serta relatif mampu bertahan dalam keadaan lingkungan yang dinamis, karena institusi atau aktor-aktor di dalamnya selalu bertindak secara rasional dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan.

## II.5. Definisi Operasional

Tabel 2.4 tentang definisi operasional di bawah ini akan menjelaskan beberapa indikator yang akan digunakan sebagai parameter dalam penelitian, indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan peninjauan teoritis serta aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Tabel tersebut bermanfaat untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang seberapa dalamnya eksplorasi penelitian tentang integrasi institusional dalam pembangunan kawasan perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Tabel 2.4 Definisi Operasional

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Integrasi Komunikatif	Adanya interaksi langsung melalui rapat, diskusi, dan bentuk lainnya antara Pemerintah dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi, LSM, dan Konsultan) dalam penyelenggaraan pembangunan di tiga kabupaten.
Integrasi Fungsional	Adanya keterlibatan langsung institusi non-pemerintah/pihak ketiga seperti Universitas atau LSM dan Konsultan dalam perencanaan seperti proses penetapan lokasi dan penyusunan dokumen RPKP di tiga kabupaten.